KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Isu Angket Ancam Turunkan Elektabilitas Ahok
Tanggal : Sabtu, 25 Februari 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Isu Angket Ancam Turunkan Elektabilitas Ahok

JAKARTA – Pengguliran hak angket DPR di tengah persiapan calon menghadapi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dinilai akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Besar kemungkinan isu angket ini akan dikapitalisasi oleh kubu lawan untuk merebut dukungan pemilih.

Bergulirnya hak angket ini dipicu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menolak memberhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernur DKI meski telah berstatus terdakwa kasus penodaan agama.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan angket Ahok Gate akan menjadi tekanan bagi pemerintah, dalam hal ini Mendagri, yang memutuskan tetap mempertahankan Ahok di kursi gubernur.

"Proses itu akan menjadi kontestasi, terutama di wilayah politis di DPR dan dalam konteks elektoral. Karena apa yang terjadi di DPR *kan* pasti akan dikapitalisasi juga oleh lawan," kata Gun Gun di Jakarta kemarin.

Gun Gun menilai hak angket tersebut bisa mendelegitimasi tingkat keterpilihan calon yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, NasDem, dan Hanura tersebut.

"Ya, bisa saja itu mendelegitimasi keterpilihan Ahok. Bahwa hak angket itu akan menjadi alat politik, itu sangat mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, DPR mengebut proses pengajuan hak angket yang diusulkan oleh 93 anggota DPR tersebut. Badan Musyawarah (Bamus) DPR bahkan diminta menggelar rapat pada masa reses yang berlangsung pada 24 Februari hingga 14 Maret. Bamus diminta menyusun jadwal agar usulan hak angket itu bisa segera dimintakan persetujuan seluruh anggota melalui rapat paripurna. Usulan angket Ahok ini telah dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis (23/2).

ISTIMEWA

GUN GUN HERYANTO
Pengamat Politik

"Harus dalam masa reses ini, artinya itu paling cepat 15 Maret atau 16 Maret-lah karena pada 15 Maret itu baru pembukaan masa sidang," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Fahri, hasil rapat Bamus tersebut nantinya akan dibawa ke rapat paripurna DPR berikutnya. Pada forum itu para pengusul angket nanti akan naik podium membacakan usulan dan alasan mengapa angket tersebut diperlukan. Jika rapat paripurna DPR tersebut menyetujui usulan hak angket digulirkan, selanjutnya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Ahok Gate. "Setelah itu kemudian di paripurna berikutnya anggota Pansus akan diumumkan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hak angket DPR ini dinilai akan jadi pertarungan sengit dua kubu di DPR beberapa waktu ke depan, terutama jika para pengusul berhasil meloloskannya di paripurna. Sejauh ini empat fraksi mendukung angket, digulirkan yakni Gerindra yang memiliki 73 anggota, PKS (40), Demokrat (61), dan Partai Amanat Nasional (49). Total kursi pendukung angket ini sebanyak 223 (39,8%). Adapun yang menolak angket adalah PDI Perjuangan (109), Golkar (91), NasDem (35), Hanura (16), Partai Kebangkitan Bangsa (47), dan Partai Persatuan Pembangunan (39). Total kursi kubu yang menolak sebanyak 337(60,1%). Namun jumlah riil kubu pendukung ataupun penolak angket ini dinilai tidak mutlak karena permintaan persetujuan di paripurna tidak mengatasnamakan fraksi, melainkan pribadi tiap anggota DPR.

Di lain pihak, fraksi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi di DPR menilai hak angket tersebut tidak seharusnya dilakukan demi menjaga stabilitas politik. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengimbau agar usulan tersebut dicabut oleh para pengusul. "Masih banyak tugas yang harus dilaksanakan, buang-buang waktu yang ujung-ujungnya hak angket ini tidak akan terpenuhi," ujarnya.

●mula akmal/ sindonews/okezone